

Irfan Pol (P), Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim, SIK, SH, MH, MM,  
A. Jaznedi Karso



# WASPADA JEBAKAN PERPANJANGAN

MASA JABATAN PRESIDEN **TIGA PERIODE**  
VERSUS JABATAN KEPALA DESA **SEMBILAN TAHUN**  
DI INDONESIA

**GULA MANIS MENJELANG  
PEMILIHAN UMUM**

**2024**



# WASPADA

## JEBAKAN PERPANJANGAN

MASA JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE  
VERSUS MASA KEPALA DESA SEMBILAN TAHUN  
DI INDONESIA.

UDA YANG BERJALANG PERLUAN BUKAN

# 2024

Gagasan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode di tahun 2022 cukup menguat. Wacana ini dikemukakan oleh kalangan elit partai politik (Golkar/PKB/PAN) yang dimana menginginkan Presiden Jokowi memimpin satu periode kembali. Perpanjangan masa jabatan ini melalui penundaan pemilu tahun 2024 yang beralasan karena sedang masa pemulihan di era pandemi covid.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD". Berdasarkan UUD 1945 hanya menyebutkan masa jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yaitu 5 (lima) tahun. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Demikian juga masa jabatan Kepala Desa di Indonesia telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Menakar peluang berupa konstruksi hukum yang termuat dalam konstitusi Indonesia khususnya yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi Tiga periode memungkinkan untuk diakomodir melalui amandemen UUD 1945, di mana UUD 1945 sendiri membuka diri untuk dapat diubah karena konstitusi bukanlah suatu hal yang final, sehingga meskipun keberadaan Pasal 7 UUD 1945 secara limitatif membatasi kekuasaan jabatan presiden maksimal selama dua periode, akan tetapi dengan konfigurasi politik hukum atau peta politik saat ini mengantarkan kita pada sebuah kesadaran normatif bahwa jabatan dua periode dapat diubah menjadi tiga periode dengan merujuk syarat-syarat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945 serta sepanjang sejalan dan sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, dengan catatan harus di dukung oleh MPR dan DPR, DPD dan pemilik saham RI yaitu seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (via amandemen UUD 1945), karena histori masa jabatan lebih dari dua periode sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia.



eureka  
media akara  
Anggota IKAPI  
No. 225/TE/2021

☎ 0858 5343 1992  
✉ eureka.media.akara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202325381



**WASPADA JEBAKAN PERPANJANGAN  
MASA JABATAN PRESIDEN TIGA  
PERIODE VERSUS JABATAN KEPALA  
DESA SEMBILAN TAHUN DI INDONESIA  
GULA MANIS MENJELANG PEMILIHAN  
UMUM 2024**

**Irjen Pol (P). Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim., SIK., SH., MH.,  
MM.**

**A. Junaedi Karso**



**eureka  
media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**WASPADA JEBAKAN PERPANJANGAN MASA JABATAN  
PRESIDEN TIGA PERIODE VERSUS JABATAN KEPALA  
DESA SEMBILAN TAHUN DI INDONESIA GULA MANIS  
MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024**

**Penulis** : Irjen Pol (P). Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim., SIK.,  
SH., MH., MM.  
A. Junaedi Karso

**Editor** : A. Junaedi Karso

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Rizki Rose Mardiana

**ISBN** : 978-623-487-887-5

**No. HKI** : EC00202325381

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr, Wb**

**Bismillahirrohmanirohim**

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang **“Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024”**.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku ini, kami juga sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, Internet media online dan media non online, serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

**Billahit tauriq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>	
<b>BAB 1</b>	<b>PENGATURAN PEMBATAAN</b>	
	<b>PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA</b>	
	<b>DESA PRO KONTRA USULAN MASA</b>	
	<b>JABATAN KEPALA DESA SEMBILAN</b>	
	<b>TAHUN DI KALANGAN MASYARAKAT</b>	
	<b>INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
	A. Periodesisasi Jabatan Kepala Desa .....	1
	B. Permohonan ke Mahkamah Konstitusi	
	Republik Indonesia .....	7
	C. MK Kembali Gelar Sidang Pengujian Masa	
	Jabatan Kades, Pemohon Pertegas Alasan.....	17
<b>BAB 2</b>	<b>JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE DAN</b>	
	<b>PENAMBAHAN JABATAN KEPALA DESA 9</b>	
	<b>TAHUN KETIDAK KONSISTENAN</b>	
	<b>BERKONSENSUS TERHADAP KONSITUSI.....</b>	<b>53</b>
	A. Negara dengan Masa Jabatan Presiden	
	3 Periode .....	58
	B. Konfigurasi Politik Hukum Indonesia	
	Memungkinkan Masa Jabatan Presiden	
	3 Periode .....	61
	C. Agenda Amandemen Konstitusi Indonesia	
	Kelima .....	65
	D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	
	42/PUU-XIX/2021 .....	87
	E. Konstruksi Masa Jabatan Kepala Desa Pasca	
	Putusan Mahkamah Konstitusi .....	93
<b>BAB 3</b>	<b>PERPANJANGAN MASA JABATAN</b>	
	<b>PRESIDEN VERSUS JABATAN KEPALA</b>	
	<b>DESA DI INDONESIA.....</b>	<b>96</b>
	A. Perpanjangan Masa Jabatan Presiden	
	Indonesia .....	96

	B. Kepala Desa Menggelar Demo Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Se Indonesia .....	126
<b>BAB 4</b>	<b>ISU PERPANJANGAN JABATAN KEPALA DESA SEMBILAN TAHUN TERKAIT WACANA PERPANJANGAN JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE .....</b>	<b>152</b>
	A. Usulan Masa Jabatan Kades Diperpanjang 9 Tahun, Mendagri: Kami Kaji Dulu Positif dan Negatifnya .....	152
	B. PDIP dan PKB Setuju Kades Tuntut 9 Tahun Masa Jabatan, Pakar Hukum: Rawan Korupsi .....	153
<b>BAB 5</b>	<b>KONFIGURASI POLITIK HUKUM INDONESIA, WACANA PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE .....</b>	<b>204</b>
	A. Negara dengan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode.....	208
	B. Konfigurasi Politik Hukum Indonesia Memungkinkan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode.....	211
	C. Agenda Amandemen Konstitusi Indonesia Kelima.....	215
	D. Dasar Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia .....	218
	E. Masa Jabatan Presiden di Indonesia .....	223
	F. Pengaturan Masa Jabatan Presiden Indonesia di Masa yang akan Datang.....	228
	G. Realiasi Pemanjangan Presiden Indonesian Selama Tiga Periode .....	233
	H. Sikap Responden Tentang Masa Jabatan Presiden Maksimal Dua Periode.....	239
	I. Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Tidak Mau Jokowi Tiga Periode .....	241
	J. Perang Klaim Keberhasilan dan Vonis Kegagalan Jokowi.....	243
	K. Lima Prioritas Kerja Jokowi-Ma'ruf.....	244
	L. Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin .....	249

M. Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya .....	250
N. Janji Kampanye yang Dinilai Gagal Direalisasikan.....	250
O. Penegakan HAM.....	250
P. Rapor 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Demokrasi dan Hukum Jadi Sorotan .....	252
Q. Pemberantasan Korupsi Kian Meluntur .....	257
R. Ketimpangan Sosial Melebar .....	260
S. Kata Jubir Soal 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin.....	263
T. Kinerja Presiden Joko Widodo dalam Memimpin Bangsa Indonesia .....	267
U. Survei Kepuasan Kinerja Jokowi .....	267
<b>BAB 6</b>	
<b>PERPANJANGAN JABATAN KEPALA DESA BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI NEGARA DAN GULA MANIS DEMI KEPENTINGAN POLITIK 2024.....</b>	<b>271</b>
A. Perpanjangan Jabatan Kepala Desa .....	271
B. Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Menentang Pembatasan Kekuasaan .....	278
C. Presiden Republik Indonesia Ir. H.Joko Widodo harus tolak usul Kades 9 Tahun.....	280
D. Soal Tuntutan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun .....	298
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>317</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>341</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Perolehan Kursi Berdasarkan Fraksi Partai Politik di MPR .....	66
Tabel 2. 2	Jumlah Kursi Fraksi PDIP dan Koalisi di MPR .....	66
Tabel 2. 3	Jumlah Kursi PDIP, Partai Koalisi dan DPD di MPR.....	67
<b>No table of figures entries found.</b>		
Tabel 5. 1	Perolehan Kursi Berdasarkan Fraksi Partai Politik di MPR .....	216
Tabel 5. 2	Jumlah Kursi Fraksi PDIP dan Koalisi di MPR .....	216
Tabel 5. 3	Jumlah Kursi PDIP, Partai Koalisi dan DPD di MPR.....	217

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Statistik Keinginan Masyarakat Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menjadi Tiga Periode.....	182
Gambar 5. 1	Gedung KPK.....	257
Gambar 5. 2	Ilustrasi Perkampungan Kumuh .....	260
Gambar 6. 1	Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) .....	302

# BAB

# 1

## PENGATURAN PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA PRO KONTRA USULAN MASA JABATAN KEPALA DESA SEMBILAN TAHUN DI KALANGAN MASYARAKAT INDONESIA

### A. Periodesisasi Jabatan Kepala Desa

Pengaturan pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa hingga 3 (tiga) periode layak dinilai mengandung kejanggalan sebab terlampau lama dan mengalami pergeseran yang kontras dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yang hanya mengatur 2 (dua) periode. Selain itu, periodisasi masa jabatan Kepala Desa juga amat kontras dengan pengaturan periodisasi masa jabatan pada Kepala Daerah bahkan dengan Presiden sekalipun. Seharusnya, pengaturan periodisasi masa jabatan antara Kepala Desa ialah mengikuti ketentuan pada Kepala Daerah dan Presiden yakni 2 (dua) periode sebab memuat filosofi dan prinsip yang sama sebagai pejabat pemerintahan eksekutif. Dengan demikian, pengaturan Kepala Desa dapat menjabat hingga 3 (tiga) periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dinilai terlampau lama, tidak berdasarkan semangat konstitusi dan tidak sesuai dengan arah politik hukum dalam UUD 1945.

Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang memutus judicial review seputar periodisasi masa jabatan Kepala Desa dapat ditarik kesimpulan yaitu: pertama, MK mengakui bahwa ketentuan yang tertulis pada bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) a quo alih-alih memperjelas Pasal 39 ayat (2), justru mengaburkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta amat berpotensi menimbulkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) periode, terkhusus bagi pihak-pihak yang memaknai bahwa perhitungan Kepala Desa telah menjabat

# BAB

# 2

## JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE DAN PENAMBAHAN JABATAN KEPALA DESA 9 TAHUN KETIDAK KONSISTENAN BERKONSENSUS TERHADAP KONSITUSI

Pada Tahun 2022 kembali ‘ramai’ menghiasi panggung diskursus di ruang publik saat ini sehingga menarik bahwa amandemen kelima UUD 1945 dapat dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan, apalagi mencermati konfigurasi politik hukum saat ini. Peta politik yang didominasi PDIP dan koalisi barang tentu upaya untuk memuluskan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dari yang tadinya secara limitatif masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode selanjutnya diubah menjadi 3 periode yang merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945. Tentu amandemen kelima tersebut perlu memperhatikan segala aspek terutama semangat reformasi dan tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Tegas bahwa keberadaan Pasal 7 UUD 1945 disebutkan: “presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan,” sehingga dalam negara yang beralam demokrasi, segala sesuatu tentunya berangkat dari keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan konstitusi yang mengandung nilai-nilai berupa norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*).<sup>9</sup> Negara Indonesia yang notabene sebagai negara hukum, sudah dipastikan landasan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam melaksanakan setiap aktivitas bernegara serta dapat dipahami bahwa kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undang tersebut berada pada Legislatif yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk dan merubah Undang-Undang bersama Presiden serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai

# BAB 3

## PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN VERSUS JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA

### A. Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia

Gagasan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode di tahun 2022 cukup menguat<sup>61</sup>. Wacana ini dikemukakan oleh kalangan elit partai politik yang dimana menginginkan Presiden Jokowi memimpin 1 periode kembali. Perpanjangan masa jabatan ini melalui penundaan pemilu tahun 2024 yang beralasan karena sedang masa pemulihan di era pandemi covid. Dengan wacana ini artinya perlu diadakannya amandemen kelima terhadap UUD 1945. Beberapa pakar Hukum Tata Negara menilai bahwa amandemen kelima ini akan banyak hambatan terutama hambatan dari masyarakat yang tidak menyetujui atas perpanjangan masa jabatan ini. Selain itu hal ini dianggap telah mematahkan semangat perjuangan reformasi yang dahulu diperjuangkan untuk melawan kekuasaan yang otoriter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni menggambarkan suatu permasalahan yang ada di lapangan. Jenis penelitiannya yuridis normative, bersumber dari data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan karena merujuk

---

<sup>61</sup> Ismazen Emshaliha, Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945, Jurnal Pemandhu, E-ISSN : 2775-0396, Vol 3, No 1 (2022), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, E-mail Corespondent : Ismazen927@gmail.com

# BAB 4

## ISU PERPANJANGAN JABATAN KEPALA DESA SEMBILAN TAHUN TERKAIT WACANA PERPANJANGAN JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE

### A. Usulan Masa Jabatan Kades Diperpanjang 9 Tahun, Mendagri: Kami Kaji Dulu Positif dan Negatifnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian<sup>80</sup> memastikan kementeriannya sedang mengkaji ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

*"Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin tetap di posisi Undang-Undang Desa sekarang, enam tahun kali tiga, jadi 18 tahun, kan lama juga itu. Ada positif (dan) negatifnya. Kami, prinsip dari Kemendagri, kami mengkaji,"* (Mendagri Tito Karnavian di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 25 Januari 2023).

Tito menambahkan jika nantinya DPR RI berinisiatif merevisi UU Desa guna memperpanjang masa jabatan kades, Kemendagri akan hadir menyampaikan pendapat soal hasil kajian tersebut. Dalam mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu, katanya, Kemendagri akan mengundang sejumlah tokoh yang memahami.

*"Kami juga akan mengundang beberapa tokoh yang paham mengenai masalah desa, pegiat desa. Itu terdengar jelas suaranya,"*. Sebelumnya, usulan revisi UU Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa disampaikan oleh

---

<sup>80</sup> <https://www.tempo.co/editor/berita/442/eko-ari-wibowo>, Usulan Masa Jabatan Kades Diperpanjang 9 Tahun, Mendagri: Kami Kaji Dulu Positif dan Negatifnya, diakses pada Tanggal 28 Februari 2023, pukul 08.32 WIB.

# BAB 5

## KONFIGURASI POLITIK HUKUM INDONESIA, WACANA PEPRPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE

Mencuatnya isu amandemen kelima terutama usulan masa jabatan presiden 3 periode kembali ‘ramai’ menghiasi panggung diskursus di ruang publik saat ini sehingga menarik ditelidik. Penelitian ini bertumpuh pada penelitian hukum doktrinal dengan kajian bahan hukum dan bahan kepustakaan sebagai data primernya, sedangkan pendekatannya berorientasi pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen kelima UUD 1945 dapat dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan, apalagi mencermati konfigurasi politik hukum saat ini. Peta politik yang didominasi PDIP dan koalisi barang tentu upaya untuk memuluskan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dari yang tadinya secara limitatif masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode selanjutnya diubah menjadi 3 periode yang merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945. Tentu amandemen kelima tersebut perlu memperhatikan segala aspek terutama semangat reformasi dan tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945<sup>110</sup>.

Kemunculan istilah “demokrasi” terjadi pada abad ke 5 Sebelum Masehi (SM) yang pertama kali dikenal di zaman Yunani Kuno, di mana secara substantif istilah tersebut telah berevolusi seiring perkembangan waktu hingga saat ini. Demokrasi adalah

---

<sup>110</sup> Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Rudini Hasyim Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 7 No. 1, Januari 2022: 32-50 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN: 2685-550X hal



# BAB 6

## PERPANJANGAN JABATAN KEPALA DESA BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI NEGARA DAN GULA MANIS DEMI KEPENTINGAN POLITIK 2024

### A. Perpanjangan Jabatan Kepala Desa

Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 (sembilan) Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi<sup>151</sup>, dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar-dasar terkait tata kelola dalam pemerintahan Desa, termasuk dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masa jabatan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa masa jabatan kepala Desa adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat menjabat selama tiga periode. Akan tetapi beberapa waktu kebelakang asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia menuntut agar masa jabatan Kepala Desa di tambah menjadi 9 (Sembilan) tahun dalam satu periode. Hal tersebut tidak selaras dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan dalam dua konsep tersebut menyatakan bahwa Suatu jabatan haruslah dibatasi dan tidak boleh terlalu lama untuk menghindari kesewenang-wenangan dan menyalahgunakan kekuasaan.

Jabatan Kepala Desa sebetulnya telah ada sebelum negara republik Indonesia merdeka. Pada zaman dahulu jabatan kepala Desa biasanya di emban oleh orang-orang yang dianggap

---

<sup>151</sup> Dudi Warsudin, Hayatun Hamid, Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi, Available Online [Http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index), E-Issn: 2550-0813 | P-ISSN: 2541-657x | Vol 10 No 1 Tahun 2023 Hal. : 422-426.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar, (2009). Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Amir, Irfan, dan Mustafa. 2021. Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP).
- Aspal, Semut. 2020. "Profil & Informasi tentang Negara Tanjung Verde," April 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT BIP (Kelompok Gramedia). Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2011.
- Azra, Azyumardi. 2021. "Menguji Daya Lenting Konstitusi di Tengah Turbulensi (Disampaikan pada Serial Kuliah Umum Konstitusi #3, diselenggarakan oleh PSHK UII."
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rahawali Pers, Jakarta, 2006
- Bidiarjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta. Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum tata Negara Republik Indonesia. Rhineka Cipta, Jakarta, 2008.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum tata Negara Republik Indonesia. Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 84-85
- Dicky Eko Prasetyo. 2021. "Menyoal Gagasan Jabatan Presiden 3 Periode." Researchgate, 2021.

- Fatimah, Dati dan Ismail, Ahmad Faisal. 2009. DPR Uncensored. PT. Bentang Pustaka. Yogyakarta.
- Gaffar, Janedjri M. "Demokrasi Dan PEMILU Di Indonesia" (2013).
- Gaffar, Janedjri M. 2013. "Demokrasi dan PEMILU di Indonesia." konstitusi Pers. Konstitusi, Mahkamah. n.d. "Putusan No.30/PUU-XVI/2018 Terkait Pengujian Pasal 182 huruf i UU Pemilu."
- Hakim, Abdul aziz. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- HRT Sri Soemantri, (2015). Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, Abdul Syukur. (Ed). 2009. Metode Analisis Teks dan Wacana. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (2006). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kaelan. Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Jakarta-Yogyakarta: Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Paradigma, 2017.
- Mahfud, Moh. 2003. "Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD." Rineka Cipta.
- Mayo. H. B. (1960). An Introduction to Democratic Theory. New York : Oxford University Press Nazir. M. (1988). Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mochammad Isnaeni Ramadhan, (2015). Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta 1988.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. n.d.
- Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putera Astomo, (2014). *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media. Yuswalina dan Kun Budiando, (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Setara Press.
- Rado, Rudini Hasyim. 2015. "Analisis UU No. 22 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2014 dan Perpu No. 1 Tahun 2014 jo. Perpu No. 2 Tahun 2014 Berkaitan dengan Pemilukada Gubernur."
- Rakhmat, Jalaludin. 2002. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Refisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.
- S.H. Sarundajang. 2012. *Pilkada Langsung; Problematika dan Prospek*. Edisi Revisi. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Sorensen. G. (2003). *Democraton and Democratization: Processed and Prospects in a Changing World*. Diterjemahkan oleh I. Made Krisna. *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharizal. 2011. *Pemilukada; Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

- Sumarno, A.P. 1989. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. PT Acitra Aditya Bakti. Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Syafiie. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Thalhah. H. M. (2009). *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*. *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli 2009
- Thoha, Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

#### **Desertasi/Tesis/Skripsi/Artikel Jurnal/Prosiding/Makalah**

- Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, Rizin Falih Alify. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024" *Jurnal Legislatif* Vol. 5 No. 2, Juni 2022.
- Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, Suprpto, Analisis Undang- Undang Desa, *Jurnal Dialektika*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Abdul Rahman Maulana Siregar, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 5 No. 5, 2017.
- Achmad Nurmandi. 2003. "Publik Dalam Pelayanan Publik" *Jurnal Administrasi Negara* Vol. III, No. 02, Maret 2003. 10-18.
- Amalia Diamantina, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 1, 2016.
- Ananias Riyoan Philip Jacob; Rex Tiran. 2019. "Dampak Covid-19 Terhadap Penundaan Pemilu Kepala Daerah di Provinsi

Nusa Tenggara Timur” Dosen Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana.

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi,” n.d. [http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi\\_dan\\_Ekokrasi.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf).

Bachtiar, 2019, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press.

Bambang Indra Gunawan, Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang – Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 No. 1, 2019.

Barus, Sonia Ivana. “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen.” University Of Bengkulu Law Journal 2, no. 1 (2017): 29–55.

Barus, Sonia Ivana. 2017. “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen.” University Of Bengkulu Law Journal 2 (1): 29–55.

Beatrix Datu Sarira, Fatma Ulfatun Najicha, Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan

Darmini Roza, “Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024”, Unes Law Riview, Volume 4, Nomor 2, 2021.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (24 April 2022). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 24 April 2022, dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Dicky Eko Prasetyo. “Menyoal Gagasan Jabatan Presiden 3 Periode.” Researchgate, 2021. [https://www.researchgate.net/publication/350726454\\_Menyoal\\_Gagasan\\_Jabatan\\_Presiden\\_3\\_Periode](https://www.researchgate.net/publication/350726454_Menyoal_Gagasan_Jabatan_Presiden_3_Periode).

- Dudi Warsudin, Hayatun Hamid, Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi*, Available Online [Http://jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Index](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index), E-Issn: 2550-0813 | P-Issn: 2541-657x | Vol 10 No 1 Tahun 2023 Hal. : 422-428.
- Elsan Yudhistira, Pembatasan “Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power”, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 2, November 2020.
- Fransiska Adelina, Bentuk-Bentuk Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No.1, 2019.
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.
- Helmi, *Supremasi Hukum Dalam Proses Dan Mekenisme Impeachment Supremasi Hukum Adalah Upaya Meneggakan dan Menempatkan Hukum Pada Posisi Tertinggi*. Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. jakarta: balai pustaka, 1995. Pada Tesis dan Disertasi.” Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Helmi, *Supremasi Hukum Dalam Proses Dan Mekenisme Impeachment Supremasi Hukum Adalah Upaya Meneggakan dan Menempatkan Hukum Pada Posisi Tertinggi*. Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. jakarta: balai pustaka, 1995.
- Hendra Wahanu Prabandani, “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 N0. 03, Oktober 2015.



- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 62-73.  
<https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/download/14254/7943>  
diakses pada tanggal 18 januari pukul 11.20 wib
- <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/14254> diakses pada tanggal 18 januari 2022 pukul 10.50 wib
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57 (2006).
- Ibrahim, Johnny. 2006. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57.
- Ika Kurniawati dan Lusi Liany, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945, *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum* Vol.10 No.1, 2019.
- Imansari, N. G. (2021). Konstruksi Berita Pemilihan Bakal Calon Presiden 2024. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 47-62.
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi. (2020). Di Badan Pusat Statistik. Diakses pada 22 April 2022, dari Badan Pusat Statistik ([bps.go.id](http://bps.go.id)).
- Irawan, B. Bambang. (2007). Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1), 54-58.
- Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*, CV. Absolute Media, Bantul.
- Ismazen Emshaliha, Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945, *Jurnal Pemandhu*, E-ISSN : 2775-0396, Vol 3, No 1 (2022), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, E-mail Correspondent : [Ismazen927@gmail.com](mailto:Ismazen927@gmail.com)

- Jefri S.Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13. No. 1, 2016.
- Joko, J. P. (2003). *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP3I.
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.3 No.1, 2021
- Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3 (1): 1-19.
- Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3 (1): 1-19. Gaffar, Janedjri M. "Demokrasi Dan PEMILU Di Indonesia" (2013). Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57 (2006).
- Jurnal Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertas* : Al Atok.A.R (2016). Penguatan Kependudukan dan Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Perubahan UUD 1945
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Inovatif*,8(1).
- Labolo, M. & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Laode Maulidin, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perseleisihan Hasil Pemilu kada Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur Dan Putusan MK Dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1, 2011.
- Latansa, Qonita Dina. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 595-616.

- Latansa, Qonita Dina. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurist-Diction 2*, no. 2 (2019): 595–616.
- Latansa, Qonita Dina. 2019. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia." *Jurist-Diction 2 (2)*: 595–616.
- LIPI. 2019. "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" *Jurnal Penelitian Politik Vol. 16, No. 01, Juni 2019*.
- Mahfud, Moh. "Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD" (2003).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). 2006. "Membangun Konstitusionalisme Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi" *Jurnal Konstitusi Vol. 03, No. 04, Desember 2006*.
- Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ma'ruf Cahyono, *Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undangundang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Moh. Ikbal Babeng, Andi Pangerang Moentha, Hamzah Halim, *Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai*, *Jurnal IUS*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhamad Aljebra Aliksan Rauf dan Rudini Hasyim Rado, "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum", *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 7, Nomor 1, 2022.

**Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Rudini Hasyim Menakar  
Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam  
Konfigurasi Politik Hukum, Jurnal Al-Adalah: Jurnal  
Hukum dan Politik Islam Vol. 7 No. 1, Januari 2022: 32-50  
P-ISSN :2406-8802- E-ISSN: 2685-550X**

Najicha, F. U. & Annisa, H. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen*, 10(2).

Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demkratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 11-15.

Nurhasan, "Pasang Surut Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Volume 6 No. 2, Oktober 2004.

Oktavianii, Cheril Liony. 2019. "Sistem Pemerintahan Vietnam." *kompasiana*, Oktober 2019.

Penundaan Pemilu Tahun 2024 Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Menjadi Tiga Periode (Perspektif Elit Politik PAN, PKB, dan GOLKAR Provinsi Lampung) (Skripsi) M. Irfan Arrafi'i 1746021009, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandarlampung 2022.

Pin Pin, Jannus Timbo Halomoan Siahaan, Bertha Nellya, Matius Bangun, Presiden Indonesia Tiga Periode, *Jurnal Darma Agung*, Universitas Darma Agung, Medan, Volume 29, Nomor 2, Agustus 2021 ; 267-272

Pratikno. (2004). *Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004*. Yogyakarta: CSPA Books.

Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi, *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, Vol. 2 No. 7 Juli Tahun 2022 Hal. 1 – 6

- Purnaweni, H. (2004). *Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa*.  
*Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 119-123.
- Purnomo, C. E. (2016). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 159-182
- Qonita Dina Latansa, "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurisdiction*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Rafif Pemenang Irawan. 2020. "Kerangka Evaluasi Pilkada; Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu" *Jurnal Adhyasta Pemilu* Vol. 03, No. 02, 2020.159-182.
- Rahmayanty, Mubarika, dan Irfan Amir. 2021. "Juridical Analysis of Implementing the Presidential Threshold in the Presidential Election Of Indonesia." *Jurnal Al-Dustur Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone* 4 (1): 83-107. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/1477/pdf>.
- Rahmayanty, Mubarika, dan Irfan Amir. 2021. "Juridical Analysis of Implementing the Presidential Threshold in the Presidential Election Of Indonesia." *Jurnal Al- Dustur Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone* 4 (1): 83-107. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/1477/pdf>.
- Rahyunir dan Sri Maulida, 2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Rajab, "Syamsuddin. Konfigurasi politik dan Penegakan Hukum Di Indonesia". Jakarta, Nagamedia, 2013.
- Rajab, "Syamsuddin. Konfigurasi politik dan Penegakan Hukum Di Indonesia". Jakarta, Nagamedia, 2013.
- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum*

- Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 4 (2018): 443–455.
- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih. “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 443–455.
- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih. 2018. “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7 (4): 443–55.
- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih. 2018. “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7 (4): 443–55.
- Riza Multazam Luthfy, Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No.4, 2019.
- Rohmatul Fitriyah. “Analisis Pesan Dan Peran Tokoh Politik Presiden Joko Widodo Mengenai Isu Jabatan 3 Periode” Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rose, R. & Mossawir, H. “Voting and Elections: A Functional Analysis” dalam Rowland B.F. Pasaribu, *Konsep-Konsep Politik*, ([wordpress.com/2013/02/bab-09-konsep-konsep-politik.pdf](http://wordpress.com/2013/02/bab-09-konsep-konsep-politik.pdf), diunduh pada tanggal 24 April 2003).
- Rosjidi Ranggawidjaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung.

- Salim, H S, and Erlis Septiana Nurbani. "Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi." Jakarta: Rajagrafindo Persada (2013).
- Salim, H S, dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. "Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi." Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Salsabilla Az-Zahra. "Analisis Pengaruh COVID-19 sebagai Situasi Ketidakpastian terhadap Demokrasi di Sub-Sahara Afrika melalui Perspektif Neorealisme" Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya
- Sanusi, H M Arsyad. "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan." Jurnal Konstitusi 6 (2009): 83-104.
- Sanusi, H M Arsyad. "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan." Jurnal Konstitusi 6 (2009): 83-104.
- Sanusi, H M Arsyad. 2009. "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan." Jurnal Konstitusi 6: 83-104.
- Sanusi, H M Arsyad. 2009. "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan." Jurnal Konstitusi 6: 83-104.
- Sardini, N. H. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Fajar Media Press. Sulastomo. (2001). Demokrasi atau Democracy. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulismadi, Wahyudi, Muslimin, 2016, Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing, Direktorat Penelitian dan Pengabdiankepada Masyarakat (DPPM) Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Sumanto, Edi. "Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir." El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 5, no. 1 (2016): 85-96.



- Sumanto, Edi. "Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5, no. 1 (2016): 85-96.
- Syaifullahil Maslul, Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021, *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, e-mail: [syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id](mailto:syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id)
- Syugiarto, Riady Ibnu Khaldun, Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi, *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, Vol. 7 No. 2 (September-Februari 2022)
- Tricahyono, I. (2009). *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing.
- <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/khazanah/article/download/518/402> diakses pada tanggal 18 januari 2022 pukul 10.35 wib.
- UGM.ac.id. 7 Maret 2022. Pengamat Politik UGM: Menunda Pemilu Kemunduran Demokrasi, Diakses pada 24 April 2022, dari Pengamat Politik UGM: Menunda Pemilu Kemunduran Demokrasi | Universitas Gadjah Mada.
- Venter, François. "Constitution-Making and the Legitimacy of the Constitution." In *Voordrag Gelewer by Die IACL Round Table Conference, Turku*, 23-24, 1997.
- Venter, François. "Constitution-Making and the Legitimacy of the Constitution." In *Voordrag Gelewer by Die IACL Round Table Conference, Turku*, 23-24, 1997.
- Wahyu Wiji Utomo. 2020. "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada; Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Civid-19 dan New Normal" *Jurnal Al-Harakah* Vol 03, No.01. Januari-Juni 2020.
- Wikipedia. 2021. "Republik Demokratik Kongo." wikipedia, Juli 2021.

Zulkarnen, Zulkarnen. "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (2017): 1-19.

Zulkarnen, Zulkarnen. "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (2017): 1-19.

Zulkarnen, Zulkarnen. 2017. "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran."

Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 5, No 1, 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

1945 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Konstitusi, Mahkamah. "Putusan No.30/PUU-XVI/2018 Terkait Pengujian Pasal 182 Huruf i UU Pemilu" (n.d.). UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

## Internet

Aditya, Rifan. "Daftar Negara Dengan Jabatan Presiden 3 Periode Dari Vietnam Hingga Kongo." Suara, March 17, 2021.

Agus Utantoro, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/551843/pshk-iii-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-tabrak-putusan-mk>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 12.27 WIB.

Ahmad Naufal Dzulfaroh, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/21/120500765/mengapa-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-harus-ditolak?page=all>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2024, Pukul 13.14 WIB.

Amandemen UUD 1945 pasal 7 dan pasal 22E. Di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Diakses pada 23 April 2022, dari J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id).

Amien Rais Official. (2021). It's Now Or Never. <https://www.youtube.com/watch?v=YGa1xyqNBQ>

Andreas, Damianus. "20 Tahun Reformasi; 10 Tuntutan Sejumlah Organisasi Ke Pemerintah." Tirto, May 21, 2018. <https://tirto.id/20-tahun-reformasi-10-tuntutan-sejumlah-organisasi-ke-pemerintah-ckUp>.

Aspal, Semut. "Profil & Informasi Tentang Negara Tanjung Verde," April 5, 2020. <https://semutaspal.com/tanjung-verde/>.

Azra, Azyumardi. "Menguji Daya Lenting Konstitusi Di Tengah Turbulensi (Disampaikan Pada Serial Kuliah Umum Konstitusi #3, Diselenggarakan Oleh PSHK UII," 2021.

Bere, Sigiranus Marutho. "Dukung Jokowi 3 Periode, Warga NTT Deklarasi Komite Referendum Masa Jabatan Presiden." Kompas, June 22, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/06/22/072206678/dukung-jokowi-3-periode-warga-ntt-deklarasi-komite-referendum-masa-jabatan?page=all>.

- Bere, Sigiranus Marutho. 2021. "Dukung Jokowi 3 Periode, Warga NTT Deklarasi Komite Referendum Masa Jabatan Presiden." *kompas*, Juni 2021.
- CNN Indonesia. (2021). Mahfud Sebut Isu Presiden 3 Periode Menjerumuskan Jokowi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210315150247-32-617637/mahfud-sebut-isu-presiden-3-periode-menjerumuskan-jokowi>
- Danu Damarjati - <https://News.Detik.Com/Berita/D-6536100/Kammi-Tolak-Ide-Perpanjangan-Masa-Jabatan-Kades>, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2024, Pukul 15.45 WIB
- Danu Damarjati-detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-6531053/perhimpunan-mahasiswa-hukum-tolak-perpanjangan-masa-jabatan-kades>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2024, Pukul 14.00 WIB
- Darmini Roza UNES Law Review 4 (2), 207-217, 2021<https://kumparan.com/hattamuhirsyad/sisibelakang-tiga-periode-presiden1w2n2GNVxh2/full> diakses pada 23 januari 15.19 WIB Artikel Soekarno, Soeharto, dan Masa Jabatan Tanpa Batas Lukman Hakie
- Deutsche Welle. (2021). Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir. <https://news.detik.com/dw/d-5361657/indeks-demokrasi-2020-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-14-tahun-terakhir>
- Eko-ari-wibowo, <https://www.tempo.co/editor/berita/442/Uji-Materi-UU-Desa-ke-MK-Penggugat-Minta-Jabatan-Kades-Cukup-5-Tahun-Seperti-Presiden>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 12.38 WIB.
- Farisa. F. C & Rastika. I. (2021). Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Jangan Buat Kegaduhan Baru. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/19264071/isu-masa-jabatan-presiden-3-periode-jokowi-jangan-buat-kegaduhan-baru>

Febriyan, "Survei Populi Center, Masyarakat Tolak Ide Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu", <https://nasional.tempo.co/read/1585376/survei-populi-center-masyarakat-tolak-ide-jokowi-3-periode-dan-penundaan-pemilu/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 3 April 2022.

Gelfeld,B (2018). Preventing Deviations from Presidential Term Limits in Low and Middle Income Democracies (Doctoral Dissertation, Pardee Rand GraduateSchool).[https://www.rand.org/pubs/rgs\\_dissertations/RGSD419.html](https://www.rand.org/pubs/rgs_dissertations/RGSD419.html)

Gischa, Serafica. "Sistem Pemerintahan Iran." Kompas, January 10, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/200000969/sistem-pemerintahan-iran?page=all>.

Gischa, Serafica. 2020. "Sistem Pemerintahan Iran." Kompas, Januari 2020. Sahbani, Agus. 2021. "Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Mungkinkah?" hukumonline, Juli 2021.

<http://indeks.kompas.com/profile/1906/Nicholas.Ryan.Aditya>  
Ryan Aditya, Dani Prabowo PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana, diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 12.45 WIB.

[https://hukumonline.com/Rofiq\\_Hidayat](https://hukumonline.com/Rofiq_Hidayat), PSHK: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Potensi Korupsi Lebih Tinggi, diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 21.07 WIB.

[https://indonesiaexpres.co.id/category/internasional/nasional/Tolak Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun! UU Desa Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Desa](https://indonesiaexpres.co.id/category/internasional/nasional/Tolak_Masa_Jabatan_Kepala_Desa_9_Tahun!_UU_Desa_Untuk_Kemajuan_dan_Kesejahteraan_Desa), diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

<https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/706523/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa->

[harus-sesuai-uu#](#), diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 20.57 WIB.

<https://jatengtoday.com/superhero/baihaqi>, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang Dr Mastur, Mengapa Harus Menolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, 27 Januari 2023, Diakses pada tanggal 9 Maret 2024, Pukul 13.51 WIB

<https://jatengtoday.com/superhero/baihaqi/alasan-mengapa-harus-menolak-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa#>, Diakses pada tanggal 9 Maret 2024, Pukul 13.35 WIB.

<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/> Abdul Azis Said Mahfud: Masa Jabatan Kades 9 Tahun Belum Tentu Bikin Politik Stabil" (3 Februari 2023), diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.15 WIB.

<https://katakata.id/> Rasid Ahmad, Suara.com, CNN Indonesia, Pro dan Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.27 WIB.

<https://kemendesa.go.id/berita/> Abdul Halim Iskandar/Masa Jabatan Kades 9 Tahun Untungkan Warga Desa, diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.24 WIB.

<https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/supremasi/hukum/pengertian-asas-dan-langkah-implimentasinya>. pukul 22.59.

<https://mahasiswaindonesia.id/pro-kontra-usulan-masa-jabatan-kepala-desa-kades-9-tahun-dikalangan-masyarakat-indonesia/#menus>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.19 WIB.

<https://News.Detik.Com/> Kepala Bidang Politik Hukum Dan Keamanan PP KAMMI, Rizki Agus Saputra, KAMMI Tolak Ide Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2024, Pukul 15.47 WIB

<https://scientia.id/author/rudi/> LuHak UMSB Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun, diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 21.17 WIB.

[https://www.bisnis.com/user/673/dionisio.damara,](https://www.bisnis.com/user/673/dionisio.damara) Soal Tuntutan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Ini Jawaban Mahfud MD Mahfud MD, diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 21.12 WIB.

[https://www.cnnindonesia.com/Muhammad\\_Naufal\\_nasional/20230125135415-32-904683/pshk-kades-9-tahun-menentang-pembatasan-kekuasaan-jokowi-harus-tolak,](https://www.cnnindonesia.com/Muhammad_Naufal_nasional/20230125135415-32-904683/pshk-kades-9-tahun-menentang-pembatasan-kekuasaan-jokowi-harus-tolak) diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 20.46 WIB.

[https://www.dw.com/id/beranda/](https://www.dw.com/id/beranda/Zaenur_Rohman) Zaenur Rohman, Perpanjangan masa jabatan dinilai tingkatan risiko korupsi Rabu, 25/1/2023), Diakses pada tanggal 9 Maret 2024, Pukul 14.12 WIB

<https://www.hukumonline.com/> Rofiq Hidayat, ICW Beberkan Tiga Masalah Mendasar dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 21.03 WIB.

[https://www.liputan6.com/6](https://www.liputan6.com/) Devira Prastiwi, Respons Pro Kontra soal Kepala Desa Minta Penambahan Masa Jabatan 9 Tahun, diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.10 WIB.

[https://www.sijogja.com/Ardian,](https://www.sijogja.com/Ardian) Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, PSHK FH UII: Hasrat Elite Lokal Untuk Berkuasa Memperoleh Dukungan DPR, , diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

<https://www.um-surabaya.ac.id/> Achmad Hariri, [Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya](#), diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 09.54 WIB.

[https://www.tempo.co/editor/berita/109/amirullah,](https://www.tempo.co/editor/berita/109/amirullah) Soal Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, dari Ancaman Demokrasi hingga Gula Manis 2024, diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul



20.50WIB.

<http://indeks.kompas.com/profile/2169/Dian.Ihsan>, Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Pakar UM Surabaya: Bertentangan Konstitusi, diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 20.54 WIB.

Ketua Umum Permahi, Fahmi Namakule, detikNews, Selasa, 24/1/2023.

M. Nur Ramadhan, masa jabatan yang panjang akan membuka peluang korupsi lebih besar, serta melanggar dan mengkhianati prinsip demokrasi, Selasa, 24/1/2023, diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 21.48 WIB.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) saat diskusi dengan Partai Gelora, Rabu, 25/1/2023) Diakses pada tanggal 9 Maret 2024, Pukul 15.36 WIB

Muhammad Faisal  
<https://jogjakartanews.com/baca/2023/01/24/24020/menakar-efektifitas-usulan-perpanjangan-masa-jabatan-kades-menjadi-9-tahun-antara-aspirasi-dan-konstitusi#menu>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 12.52 WIB.

Muslikhin Effendy, <https://www.goriau.com/home.html>, Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Munculkan Chaos di Masyarakat, Diakses pada tanggal 9 Maret 2024, Pukul 15.32 WIB

Nicholas Ryan  
Aditya, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/28/17330941/soal-gugatan-uu-desa-ke-mk-apdesi-jangan-jadi-masalah-besar>. diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 12.48 WIB.

Oktaviani, Cheril Liony. "Sistem Pemerintahan Vietnam." Kompasiana, October 19, 2019.  
<https://www.kompasiana.com/cherillionyoktaviani/5dab0d8f0d82304f2a07bd42/sistem-pemerintahan-vietnam>.

- Orde Baru. (2022). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 24 April 2022, dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orde\\_Baru&ol did=20318133](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orde_Baru&ol did=20318133).
- Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Tiga Masalah Mendasar dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 21.45 WIB.
- Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta R Mazdan Maftukha Assyayuti, S.H., M.H (Jumat 20 Januari 2023)
- Putri. B. U & Persada. S. (2021). Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Demokrat: Power Tends to Corrupt. <https://nasional.tempo.co/read/1442165/isu-masa-jabatan-presiden-3-periode-demokrat-power-tends-to-corrupt/full&view=ok>.
- Rado, Rudini Hasyim. "Analisis UU No. 22 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2014 Dan Perpu No. 1 Tahun 2014 Jo. Perpu No. 2 Tahun 2014 Berkaitan Dengan Pemilukada Gubernur," 2015.
- Rinaldo <https://www.liputan6.com/> MK Kembali Gelar Sidang Pengujian Masa Jabatan Kades, Pemohon Pertegas Alasan, diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 12.41 WIB.
- Safitri. E. (2021). Analisis Ahli soal Isu Presiden 3 Periode dan Orang-orang Dekat Jokowi. <https://news.detik.com/berita/d-5496268/analisis-ahli-soal-isu-presiden-3-periode-dan-orang-orang-dekat-jokowi>
- Sahbani, Agus. "Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Mungkinkah?" Hukumonline, July 9, 2021. <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t60e6ba7e2b84a/masa-jabatan-presiden-3-periode--mungkinkah>.
- Sari. H. P & Meiliana. D. (2021). Megawati: Jokowi Dikocok Ingin 3 Periode, yang Ngomong Itu Sebenarnya yang Mau. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/18142111>

/megawati- jokowi-dikocok-ingin-3-periode-yang-  
ngomong-itu-sebenarnya-yang-mau

Serenata. "Bentuk-Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN."  
Quipper, Desember 16, 2019.

[https://www.quipper.com/id/blog/mapel/bentuk-  
bentuk-pemerintahan-negara-asean/](https://www.quipper.com/id/blog/mapel/bentuk-bentuk-pemerintahan-negara-asean/).

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK),  
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik  
Kepemimpinan Publik, diakses pada tanggal 8 Maret 2023,  
pukul 21.14 WIB.

Sri Pujianti, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Beranda>,  
Bukan Soal Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU  
Desa, diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 12.10  
WIB.

The Economist Intelligence Unit (EIU). (2020).  
Democracy Index 2020.  
[https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-  
2020/](https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/) Ubaidillah. A., Rosyada. D., Rozak. A., Salim. M. A.,  
Sayuti. W & Syafrani. A. (2000).

Tsarina Maharani, "Pengamat: Wacana Presiden Tiga Periode Tidak  
Mudah Terwujud,  
[https://nasional.kompas.com/read/2021/03/20/12240811  
/pengamat-wacana-presiden-tiga-periode-tidak-mudah-  
terwujud](https://nasional.kompas.com/read/2021/03/20/12240811/pengamat-wacana-presiden-tiga-periode-tidak-mudah-terwujud). Diakses pada 15 April 2022.

Ubedilah Badrun, Mengapa Perpanjangan Masa Jabatan Kepala  
Desa Harus Ditolak, Kompas.com, Jumat (19/1/2023),  
. Diakses pada tanggal 9 Maret 2024, Pukul 13.19 WIB.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Utami Argawati,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Beranda>,  
Menguji Masa Jabatan Kepala Desa, diakses pada tanggal 18  
Februari 2023, pukul 12.06 WIB.

Wikipedia. "Republik Demokratik Kongo." Wikipedia, July 1, 2021.[https://id.wikipedia.org/wiki/Republik\\_Demokratik\\_Kongo](https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Demokratik_Kongo).

Yahya. A. N & Erdianto. K. (2021). Peneliti LIPI: Isu Presiden 3 Periode Muncul sejak Era SBY hingga Jokowi. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/14540581/peneliti-lipi-isu-presiden-3-periode-muncul-sejak-era-sby-hingga-jokowi>

## TENTANG PENULIS



**Irjen. Pol. (P) Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim, S.IK.,SH, MH, MM,** Lahir di Brebes, pada tanggal 11 September 1960, yang bertempat tinggal Jl. H. Abu No. 16 RT. 05 / RW. 07 Cipete Selatan Cilandak Jaksel 12410, ia adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi Polri alumnus Akademi Kepolisian tahun 1984 yang berpengalaman dalam bidang reseerse, selain purnawirawan polri ia adalah seorang akademisi, praktisi

hukum, dan penulis, ada banyak buku dan jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang telah ia buat, adapun diantara karya-karyanya, antara lain: Buku dengan judul Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024 Meraung Penudaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024; Revitalisasi Kerjasama Regional Dan Internasional Di Bidang Penegakan Hukum Guna Meningkatkan Hubungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jurnal internasional; Rewards For Polri Members Who Successfully Disclosed 1,196 Tons Of Sabu Towards An Excellent And Shone Polri Resources; Law Enforcement On The Death Of Brigadier J Under Law And Regulation Of The President Of The RI; Corruption Eradication Commission Formula-E Case Between Justice, Criminalization And Anies Baswedan Phobia

Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi Universitas Slamet Riyadi Fakultas Hukum (S1) lulus Tahun 2001; Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada Magister Hukum (S2) Yogyakarta lulus pada tahun 2003; Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada Fakultas Ekonomi Magister Management (S2) Yogyakarta lulus

pada tahun 2006; dan pada Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Trisakti (S3) – Jakarta lulus pada tahun 2014;

Pendidikan Kedinasan, AKPOL 1984; PTIK 1991; SESPIMEN POLRI 1998; SESPIMTI POLRI 2007; LEMHANNAS RI 2012.

Pengalaman Kerja, Kepolisian Negara Republik Indonesia Pamapta Polres Kupang Ntt 23-11-1984 03-12-1984; Kepolisian Negara Republik Indonesia Ps Kapuskodal Ops Polres Kupang Polwil Ntt 03-12-1984 07-03-1985; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolsek Kupang Tengah Polwil NTT 07-03-1985 11-05-1985; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dansat Patwal Ditlantas Polda Nusra 11-05-1985 29-10-1987; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kasat Lantas Polres Badung Polda Nusra 29-10-1987 18-07-1989; Kepolisian Negara Republik Indonesia Paur Ops Ditlantas Polda Nusra 18-07-1989 24-06-1991; Kepolisian Negara Republik Indonesia Pama Polda Jabar 24-06-1991 04-10-1991; Kepolisian Negara Republik Indonesia Ps Kapolsek Pelabuhan Ratu 04-10-1991 30-01-1992; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolsek Pacet Polres Cianjur Polda Jabar 30-01-1992 03-01-1995; Kepolisian Negara Republik Indonesia Guru Muda Pusdik Resintel Lemdiklat Polri 03-01-1995 01-06-1997; Kepolisian Negara Republik Indonesia Pamen Mabes Polri 01-06-1997 01-06-1998; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dansat Idik Inprodag Dit Serse Ek Korserse Polri 01-06-1998 01-08-2000; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolres Kendal 01-08-2000 12-11-2001; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolres Pekalongan 12-11-2001 01-10-2003; Kepolisian Negara Republik Indonesia Wadir Reskrim Polda Diy 01-10-2003 28-09-2004; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kanit I Counter Terrorism Tncc 28-09-2004 19-01-2006; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dir Reskrim Polda Bali 19-01-2006 30-06-2007; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabid Interpol Set Ncb-Interpol Indonesia 30-06-2007 29-09-2010; Kepolisian Negara Republik Indonesia Karo Misi Internasional Divhubinter 29-09-2010 17-02-2011; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dir V/ Tipidter Bareskrim Polri 17-02-2011 26-01-2012; Kepolisian Negara Republik Indonesia Sahli Kapolri Bid Sospol 26-

01-2012 27-06-2012; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolda Kalimantan Timur 27-06-2012 07-06-2013; Kepolisian Negara Republik Indonesia Waka Bareskrim Polri 07-06-2013 22-08-2014; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolda Jawa Timur 22-08-2014 03-09-2015; Kepolisian Negara Republik Indonesia Gubernur Akpol 03-09-2015; Lemhannas RI Tenaga Ahli Pengajar 2015 2018.

Selain pengalaman penugasan di dalam negeri ia juga diberikan Amanah untuk menjalankan tugas-tugas di Luar Negeri, yaitu antara lain: 1992 Police Study on Criminal Investigation, Bundeskriminalamt-BKA Weisbaden-Germany; 1998 Special Training on E-Commerce, Landest Polizei Schule-Berlin-Germany; 2005 International Police Training on Drugs and Economic Crime, Bundeskriminalamt-BKA Weisbaden-Germany; 2006 United Nation Conference on Arms Smuggling, New York-USA; 2007 Comparative Study of Police System in South Korea, China and Hongkong; 2007 Interpol Working Group meeting on Trafficking in Person (TIPS), Canada ; 2008 Working meeting on Cocaine-related Crime in Asia with Involvement of West African Criminal Group, Bangkok; 2008 The 77th Interpol General Assembly, Saint Petersburg-Rusia; 2008 Comparative Study Of Detention System And Mechanism Of Law In Netherland, Germany And France; 2009 5th Annual Heads of NCB-Interpol Conference, Lyon-France; 2009 Working meeting Project Kanun ethnic Albanians and illegal drugs trafficking, Ohrid Farmer Yugoslavia Republic of Macedonia; 2009 29th Aseanapol Conference, Hanoi Vietnam; 2009 4th International Expert meeting on Genocide, War Crime and Crime Againsts Humanity, Norway; 2009 Joint investigation on Virtual Fraud Crime between INP-Royal Brunai Police Force; 2010 6th Annual Heads of NCB-Interpol Conference, Lyon-France; 2010 12th UN Congress on Crimes Prevention and Criminal Justice, Salvador-Brasill; 2010 Interpol Fugitive Conference, Toronto-Kanada; 2010 Study Comperative on Law Enforcement Money Laundering Cooperation with France Parlement, Perancis; 2010 Ministerial Meeting on Security Issues, Sochi-Federasi Rusia; 2011 UN Peace Keeping Conference, PBB, New York, USA; 2012 Indonesian Bussines Day Conference Hamburg, Germany; 2012 Task Force for Most Wanted

Person in Bogota, Colombia; 2012 Strategic Study Lemhannas RI in Japan; 2013 13 th SOMTC Meeting in Danang, Vietnam, June; 2013 9th AMMTC, Meeting in Vientiane, Lao PDR; 2014 Working Group Meeting between INP and AFP Australia; 2014 Bilateral Working Group Meeting between INP and Newzeland Police Force , Wellington; 2014 ASEAN Senior Officer Meeting on The Transnational Crime, Brunai Darusalam; 2015 Bilateral Working Group Meteeng between INP and Bayer Police Force, Munich.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +6281818114067 atau email [anasyusuf1984@gmail.com](mailto:anasyusuf1984@gmail.com)





**A Junaedi Karso** lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*,

(Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (*International Journal of Social Science Humanities Research*, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District*,

*Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);*

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Piercing Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanities Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implementing Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engineering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rule*<http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa>, 2021)

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governanance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan

Nopryansah Yoshua Hutabarat, *Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk), Seputar Lintasan Kejahatan Realita Antara & Kamufase Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Siapa Diuntungkan dan siapa yang Buntung Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat atau Cukong dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi di Indonesia.*

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/ Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam

Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awarness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui

*Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh

Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email [Bintang.lyatiara66@gmail.com](mailto:Bintang.lyatiara66@gmail.com), juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202325381, 31 Maret 2023

**Pencipta**  
Nama : **Irjen Pol (P). Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim, SIK., SH., MH., MM. dan A. Junaedi Karso**  
Alamat : Jl. H. Abu No. 16, RT.005/RW.007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12410  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Irjen Pol (P). Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim, SIK., SH., MH., MM. dan A. Junaedi Karso**  
Alamat : Jl. H. Abu No. 16, RT.005/RW.007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12410  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 Maret 2023, di Purbalingga  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.  
Nomor pencatatan : 000458303

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.